



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Benny Riyanto
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi bersama Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai dengan Tusi BPHN)	3,1
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77,0
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79,0
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

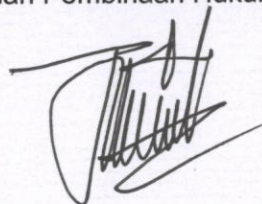
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25
2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 99,513.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 99,513.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 820,766.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 820,766.000,-

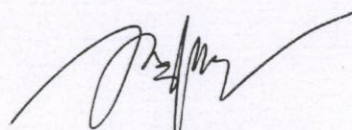
Jakarta, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

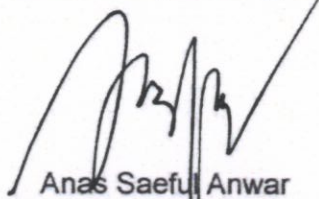
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 4 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002